



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

UNIT KERJA : **WAKIL PIMPINAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PURWIYANTO**
2. Jabatan : **WAKIL KEPALA BP BATAM**
3. NHK : **139737**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.162.088.000**

1. Tanah Seluas 2300 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/70 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 667.088.000
3. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
4. Tanah Seluas 6000 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Bangunan Seluas 47 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 870.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/120 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
7. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 573.750.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000
2. MOBIL, HONDA JEEP / CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, HONDA JEEP / HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	57.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.250.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.042.838.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.042.838.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.